



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2026



**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM**





WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 372 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Batam tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
16. Peraturan...

16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4);
18. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1722);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN
- c. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- d. BAB IV PENUTUP

KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:

- a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;

b. landasan...

- b. landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memastikan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah disusun berlandaskan Perubahan RKPD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 26 Agustus 2026

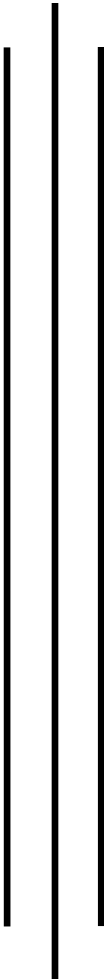
WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHMAD

LAMPIRAN XXIV : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 372 TAHUN 2026
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Perhubungan Kota Batam dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Perhubungan Kota Batam memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun Anggaran 2026 yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Batam.

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2026 semoga bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Batam, 18 Agustus 2026
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM



Drs. LEO PUTRA, AP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750806 199501 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	7
 BAB II EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2026..	8
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan.....	11
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan.....	12
 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM.....	14
 BAB IV PENUTUP	31
4.1 Catatan Penting	32
4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan	33
4.3. Rencana Tindak lanjut	34

DAFTAR TABEL

II.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas
Perhubungan Tahun 2026 s/d Triwulan II..... 8

II.2. Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2026 s/d
Triwulan II..... 11

II.3. Isu-isu Penting Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Perhubungan Kota Batam..... 13

III.1.Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu
pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan
Kota Batam Tahun 2026..... 15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan yang disusun untuk penyesuaian perencanaan tahunan akibat adanya pergeseran, penambahan, atau pengurangan anggaran. Perubahan Renja Tahun 2026 memuat perubahan pagu anggaran serta perubahan indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan, dan menjadi bahan acuan bagi penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun Anggaran 2026.

Penyusunan dokumen ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Berdasarkan Pasal 343 ayat (1) peraturan tersebut, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan pada tahun berjalan menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yaitu:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Selanjutnya, pasal Pasal 351 dan 352 mengatur bahwa setelah Rancangan Perubahan RKPD memperoleh persetujuan Kepala Daerah, Kepala Daerah menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan Perubahan Rrenja Perangkat Daerah. Setiap Kepala Perangkat Daerah kemudian menyempurnakan Rancangan Perubahan Renja dengan berpedoman pada surat edaran dan Rancangan Perubahan RKPD.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Rancangan Perubahan RKPD;

- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Penyusunannya terdiri atas perumusan dan penyajian Rancangan Perubahan Renja, di mana perumusan mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II, dan penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rancangan Perubahan Renja disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- d. penutup.

Berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 maka Dinas Perhubungan Kota Batam menyusun Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman kepada perubahan RKPD Tahun 2026 setelah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Mei 2026.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Batam adalah :

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) ;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6323);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 11) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 12) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
- 13) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 15) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 22) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- 24) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil

Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

- 25) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6);
- 26) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69);
- 27) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119);
- 28) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
- 29) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4);
- 30) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119);
- 31) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4 Noreg Peraturan Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau:4,18/2025);
- 32) Peraturan Walikota Batam Nomor 73 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan

Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1643);

- 33) Peraturan Walikota Batam Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun, sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2026 yaitu:

1. melakukan penyesuaian terhadap proiritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah;
2. menjadi pedoman dan arah dalam penyusunan perubahan anggaran Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2026 dan sebagai dasar penentuan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Perubahan RKA Tahun Anggaran 2026;

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I Pendahuluan (latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan); Bab II Evaluasi Rencana Kerja Dinas Perhubungan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 (hasil evaluasi pelaksanaan Renja, analisis kinerja pelayanan, serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi); Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan; dan Bab IV Penutup (catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut).

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat berdasarkan pelaksanaan kinerja terhadap Renja tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah. Realisasi terhadap Renstra mengacu pada laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD. Rekapitulasi realisasi program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 disajikan pada Tabel II.1.

Tabel II.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2026 s/d Triwulan II

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja 2026)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1					2	3	4	5	6
					DINAS PERHUBUNGAN				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	73,53	72,81	99%
						Indeks Pelayanan Kesekretariatan Dinas Perhubungan	90,45	90,60	100%
2	15	01	02.01.		KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan	100%	40%	40%
2	15	01	02.01.	0001	SUB KEGIATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun pada tahun berjalan	2 Dokumen	0	0%
2	15	01	02.01.	0002	SUB KEGIATAN Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun pada tahun berjalan	3 Dokumen	2 Dokumen	33%
2	15	01	2.02		KEGIATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100%	100%	100%
2	15	01	2.02	0001	SUB KEGIATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	210 Orang/bulan	210 Orang/bulan	100%
2	15	01	2.02	0002	SUB KEGIATAN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16 Dokumen	16 Dokumen	100%
2	15	01	2.05		KEGIATAN Administrasi kepegawaian Perangkat	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100%	0%	0%
2	15	01	2.05	0009	SUB KEGIATAN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	0	0%
2	15	01	2.06		KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	18%	18%
2	15	01	2.06	0001	SUB KEGIATAN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	0%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja 2026)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1					2	3	4	5	6
2	15	01	2.06	0002	SUB KEGIATAN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	4 Paket	4 Paket	0%
2	15	01	2.06	0004	SUB KEGIATAN Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	0%
2	15	01	2.06	0005	SUB KEGIATAN Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	0	0%
2	15	01	2.06	0009	SUB KEGIATAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	7 laporan	23%
2	15	01	2.07		KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 %	81%	81%
3	16	02	2.08	0005	SUB KEGIATAN Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	2 paket	0%
2	15	01	2.07	0006	SUB KEGIATAN Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	6 Unit	0%
2	15	01	2.08		KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	50%	50%
2	15	01	2.08	0002	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	100%
2	15	01	2.08	0004	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	7 laporan	31%
2	15	01	2.09		KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	50%	50%
2	15	01	2.09	0001	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100%
2	15	01	2.09	0002	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	22 unit	100%
2	15	01	2.09	0006	SUB KEGIATAN Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	145 Unit	145 Unit	0%
					SUB KEGIATAN : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	0	0%
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia	71%	65%	92%
						Persentase angkutan barang dan angkutan penumpang umum yang wajib uji laik jalan dan lulus uji KIR	53%	23%	43%
2	15	02	2.02		KEGIATAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan yang dibangun setiap tahunnya	100 %	12%	12%
2	15	02	2.02	0001	SUB KEGIATAN Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	6 Unit	0	0%
2	15	02	2.02	0002	SUB KEGIATAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	309 Unit	0	0%
2	15	02	2.02	0003	SUB KEGIATAN Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	6 Unit	0	0%
2	15	02	2.02	0004	SUB KEGIATAN Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	4 Unit	0	0%
2	15	02	2.05		KEGIATAN Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pelaksanaan Kegiatan PKB	100%	0%	0%
2	15	02	2.05	0001	SUB KEGIATAN Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	0	0%
2	15	02	2.05	0004	SUB KEGIATAN Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5.000 Dokumen	0	0%
2	15	02	2.05	0007	SUB KEGIATAN Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	3 Unit	0	0%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja 2026)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1					2	3	4	5	6
2	15	02	2.06		KEGIATAN Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dan pembangunan ZOSS dalam 1 tahun	100%	12%	61%
2	15	02	2.06	0013	SUB KEGIATAN Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	1 Unit	0	0%
2	15	02	2.06	0016	SUB KEGIATAN Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	35 Unit	0	0%
2	15	02	2.08		KEGIATAN Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas	100 %	6%	3%
2	15	02	2.08	0004	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	32 Laporan	3 Laporan	9%
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang tersedia	73%	69%	95%
2	15	03	2.12		KEGIATAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dermaga yang dibangun dan dipelihara pada tahun berjalan	4 Unit	0	0%
2	15	03	2.12	0001	SUB KEGIATAN : Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah pelabuhan pengumpan lokal yang dibangun	1 Unit	0	0%
2	15	03	2.12	0003	SUB KEGIATAN Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	3 Unit	0	0%
					UPTD TRANSPORTASI				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	73,53	72,81	99%
						Indeks Pelayanan Kesekretariatan Dinas Perhubungan	90,45	90,60	100%
2	15	01	2.10		KEGIATAN Peningkatan Pelayanan BLUD	persentase pelayanan BLUD	100 %	43%	43%
2	15	01	2.10	0001	SUB KEGIATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100%
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase peningkatan jumlah penumpang transportasi darat yang dilayani oleh Dinas Perhubungan (Trans Batam)	12%	8,6%	72%
2	15	02	2.09		KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam	42%	42%	71%
2	15	02	2.09	0003	SUB KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	69 Unit	69 Unit	72%
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase peningkatan jumlah penumpang Transportasi Laut yang dilayani oleh Dinas Perhubungan	24%	0%	0%
2	15	03	2.07		KEGIATAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Transportasi Laut yang beroperasi	9 Unit	8 Unit	89%
2	15	03	2.07	0004	SUB KEGIATAN Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	8 Laporan	8 Laporan	100%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja 2026)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1					2	3	4	5	6
					UPTD PELAYANAN PARKIR				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
2					PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
					Persentase Peningkatan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum				
					5%				
					0%				
					0%				
2					KEGIATAN Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				
					Jumlah Penambahan Satuan Ruang Parkir (SRB) Baru				
					1204 SRP				
					8083 SRP				
					100%				
2					SUB KEGIATAN Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				
					12 Laporan				
					6 Laporan				
					25%				

Secara umum, tingkat penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 masih didominasi oleh belanja operasional rutin dan kegiatan yang bersifat berkelanjutan. Sementara itu, realisasi belanja untuk kegiatan pengadaan dan pembangunan fisik pada periode ini baru memasuki tahap pelaksanaan konsultan perencanaan, sehingga capaian fisiknya diperkirakan akan meningkat signifikan pada triwulan-triwulan berikutnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel II.2. Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2026 s.d Triwulan II

NO	INDIKATOR SASARAN DINAS PERHUBUNGAN	TARGET KINERJA CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2026		REALISASI /PROTEKSI KINERJA CAPAIAN RENSTRA TW II TAHUN 2026		CATATAN ANALISIS
		SATUAN	VOLUME	SATUAN	VOLUME	
1	2	3	4	5	6	7
1	Rasio Konektivitas Darat	Nilai	0,909	Nilai	0,900	
2	Rasio Konektivitas Laut	Nilai	0,667	Nilai	0,667	
3	lndeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan Dinas Perhubungan	Nilai	90,45	Nilai	89,54	

Berdasarkan tiga indikator kinerja sasaran yang diukur sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 (Tabel II.2), capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Batam dapat disampaikan sebagai berikut:

- Rasio konektivitas darat tercapai sebesar 0,900 dari target 0,909, atau 99,01% dari target. Capaian ini menunjukkan konektivitas jaringan transportasi darat telah berjalan dengan baik dan hampir mencapai target. Selisih sebesar 0,009 perlu dioptimalkan melalui peningkatan keterhubungan jaringan angkutan, penguatan pelayanan pada wilayah yang belum terlayani secara optimal, serta peningkatan efektivitas manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- Rasio konektivitas Laut tercapai sebesar 0,667, sama dengan target 0,667 artinya target telah tercapai 100%. Kondisi ini perlu dipertahankan melalui pemeliharaan dan peningkatan kualitas sarana angkutan umum, pengawasan kelayakan kendaraan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan Dinas Perhubungan tercapai sebesar 89,54% dari target 90,45%, atau sekitar 98,99% dari target. Masih terdapat selisih 0,91 poin, sehingga diperlukan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, khususnya pada aspek-aspek yang paling memengaruhi persepsi dan kepuasan masyarakat terhadap layanan perhubungan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Batam

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja, selain berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Batam, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang. Isu-isu yang memiliki nilai strategis pembangunan patut dijadikan acuan dan perhatian utama dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan. Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra, dirumuskan isu-isu penting sebagaimana disajikan pada Tabel II.3, yang mencakup permasalahan di bidang lalu lintas, prasarana

perhubungan darat, pengujian kendaraan, prasarana perhubungan laut, pelayanan Trans Batam, dan pelayanan parkir.Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Perhubungan Kota Batam dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel II.3. Isu-isu Penting Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Batam

NO	ASPEK	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
1.	Permasalahan di Bidang Lalu Lintas	Belum optimalnya pembangunan ATCS di seluruh persimpangan dikota Batam	Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas
		Belum terlaksananya peningkatan ATCS (Area Traffic Control System) menuju ke ITS (Intelegent Traffic System)	
		Belum optimalnya pembangunan <i>Command Center</i> untuk menggabungkan seluruh jaringan utilitas milik Pemerintah Kota Batam guna mempermudah penggorganisasian dan manajemen pengaduan dan pelaporan masyarakat	
2.	Permasalahan di bidang Prasarana Perhubungan Darat	Pelaksanaan peningkatan jalan di kota Batam yang masih berlangsung sehingga banyak ruas-ruas jalan di Kota Batam yang belum dilengkapi fasilitas kelengkapan jalan berupa Rambu-rambu dan Marka Jalan yang dapat menyebabkan terjadinya kemacetan dan kecelakaan lalu lintas	Belum optimalnya sarana dan prasarana Perhubungan untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas
3.	Permasalahan di bidang Prasarana Perhubungan Laut	Belum terpenuhinya sarana dan prasarana diwilayah hinterland	Belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas transportasi di wilayah hinterland
4.	Permasalahan di bidang Pengujian Kendaraan	Masih rendahnya kesadaran masyarakat pemilik kendaraan wajib uji untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor	Belum optimalnya Pengujian terhadap Kendaraan wajib uji
		Masih banyak kendaraan angkutan barang yang Over Dimensi dan Over Load (ODOL)	
		Kurangnya SDM yang bersertifikasi Pengujian	
5.	Permasalahan di Pelayanan Trans Batam	pengembangan 10 Koridor Trans Batam dan pencapaian 120 unit jumlah armada belum tercapai	Belum optimalnya pengembangan Trans Batam sebagai transportasi masal di Kota Batam
		Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan Trans Batam mengingat transportasi online yang berkembang saat ini lebih efisien	
		Pengoperasian feeder untuk mendukung integrated transport system belum terlaksana	
		Masih minimnya fasilitas halte Trans Batam sebagai tempat turun naik penumpang di ruas jalan Kota Batam	
6.	Permasalahan di Pelayanan Parkir	Masih banyaknya kendaraan yang parkir di bahu jalan	Belum Optimalnya Pelayanan Parkir di Kota Batam
		Belum maksimalnya pelaksanaan parkir non tunai tepi jalan di Kota Batam	
		Masih banyak Jukir Liar dilapangan	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

Program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 serta mengacu pada prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, sebagian besar program, kegiatan, dan subkegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Batam mengalami penyesuaian, baik berupa penambahan, pengurangan, maupun pergeseran alokasi anggaran. Pada RKPD Tahun 2026, Dinas Perhubungan memperoleh pagu indikatif sebesar Rp133.460.409.681,00, berdasarkan rincian program, kegiatan, dan subkegiatan pada Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2026 (Tabel III.1), pagu anggaran Dinas Perhubungan ditetapkan sebesar Rp141.224.349.582,00. Dibandingkan dengan pagu APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp126.321.935.323,00, pagu ini bertambah Rp14.902.414.259,00. Bila dibandingkan dengan pagu RKPD Tahun 2026 sebesar Rp133.460.409.681,00, pagu ini bertambah Rp7.763.939.901,00.

Peningkatan pagu tersebut sebagian besar terjadi pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) — terutama pada kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan, Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (termasuk pembangunan Zona Selamat Sekolah), dan Penerbitan Izin Penyelenggaraan serta Pembangunan Fasilitas Parkir — sementara Program Pengelolaan Pelayaran mengalami penyesuaian ke bawah pada kegiatan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal karena capaian target unit dermaga yang lebih rendah dari rencana semula.

Rincian program, kegiatan, dan subkegiatan beserta pagu anggaran pada Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2026 disajikan pada Tabel III.1

TABEL III.1. Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 10-12	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERHUBUNGAN								133.460.409.681,00	126.321.935.323,00	141.224.349.582,00	7.763.939.901,00						178.152.945.139,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							133.460.409.681,00	126.321.935.323,00	141.224.349.582,00	7.763.939.901,00							178.152.945.139,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							133.460.409.681,00	126.321.935.323,00	141.224.349.582,00	7.763.939.901,00							178.152.945.139,00	
1,	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Nilai SAKIP PD - Indeks Pelayanan Kesekretariatan Dinas Perhubungan				73.53 Nilai 92 Nilai	73.53 Nilai 92 Nilai	48.985.704.763,00	46.817.189.016,00	45.688.966.803,00	103.962.909,00							49.089.667.672,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu				100 %	100 %	18.967.500,00	18.967.500,00	18.967.500,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	ASN Dinas Perhubungan		20.864.250,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	2 Dokumen	9.347.000,00	9.347.000,00	9.347.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			10.281.700,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	3 Laporan	9.620.500,00	9.620.500,00	9.620.500,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			10.582.550,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 10-12	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan				100 %	100 %	30.203.174.238,00	27.771.886.676,00	26.247.642.770,00	-3.955.531.468,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Pegawai Dinas Perhubungan		33.203.833.662,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				207 Orang/ bulan	201 Orang/ bulan	30.006.594.238,00	27.585.326.676,00	26.061.082.770,00	-3.945.511.468,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			33.007.253.662,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				17 Dokumen	16 Dokumen	196.580.000,00	186.560.000,00	186.560.000,00	-10.020.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			196.580.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya				100 %	100 %	142.484.700,00	78.962.000,00	78.962.000,00	-63.522.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Pegawai Dinas Perhubungan		97.576.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 10-12	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				67 Paket	67 Paket	63.522.700,00	0,00	0,00	-63.522.700,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	78.962.000,00	78.962.000,00	78.962.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			97.576.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	270.439.200,00	347.743.900,00	252.296.900,00	-18.142.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Pegawai Dinas Perhubungan		410.374.900,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	25.628.000,00	25.628.000,00	25.628.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			131.522.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	91.895.900,00	69.365.600,00	69.365.600,00	-22.530.300,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			102.561.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 10-12	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			17.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	23.449.300,00	23.449.300,00	23.449.300,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			26.141.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	26 Laporan	111.966.000,00	211.801.000,00	116.354.000,00	4.388.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			132.650.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan				100 %	100 %	130.004.600,00	130.004.600,00	151.837.100,00	21.832.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Pegawai Dinas Perhubungan		377.308.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				19 Unit	31 Unit	20.706.000,00	20.706.000,00	20.706.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			155.728.100,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	15 Unit	109.298.600,00	109.298.600,00	131.131.100,00	21.832.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			221.580.700,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 10-12	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan				100 %	100 %	1.349.334.425,00	1.506.686.240,00	1.586.736.626,00	237.404.403,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Pegawai Dinas Perhubungan		1.201.022.520,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	12 Laporan	1.095.198.200,00	1.118.020.600,00	1.197.942.226,00	142.784.028,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			1.030.503.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	294.176.225,00	388.675.640,00	388.706.600,00	94.620.375,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			170.519.520,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi				100 %	100 %	1.542.633.900,00	1.634.261.900,00	1.973.618.900,00	430.985.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Pegawai Dinas Perhubungan		867.634.190,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 10-12	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	38.880.000,00	42.640.000,00	0,00	-38.880.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			38.880.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				22 Unit	22 Unit	579.110.000,00	666.978.000,00	655.861.000,00	76.771.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			666.977.580,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				105 Unit	147 Unit	122.084.900,00	122.084.900,00	122.084.900,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			133.876.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	802.559.000,00	802.559.000,00	1.195.653.000,00	393.094.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 10-12	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat yang tersedia				71 %	71 %	72.803.996.710,00	69.206.445.884,00	87.987.776.856,00	34.814.530.709,00							107.618.527.419,00	
			Persentase peningkat jumlah penumpang transportasi darat yang dilayani oleh Dinas Perhubungan (Trans Batam)				12 %	12 %												
			Persentase angkutan barang dan angkutan penumpang umum yang lulus uji KIR				53 %	53 %												
			Persentase Peningkatan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum				5 %	5 %												
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlingkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan darat yang terbangun				100 %	100 %	6.139.585.800,00	6.806.913.800,00	13.628.893.600,00	7.489.307.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		10.451.954.166,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				6 Unit	10 Unit	1.085.850.000,00	1.753.178.000,00	8.290.964.800,00	7.205.114.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			3.564.039.710,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 10-12	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlekangan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlekangan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				310 Unit	460 Unit	1.708.958.300,00	1.708.958.300,00	1.993.151.300,00	284.193.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			5.852.998.256,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan																		
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				2 Unit	3 Unit	115.810.000,00	115.810.000,00	115.810.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			725.099.200,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlekangan Jalan																		
			Jumlah Perlekangan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				7 Unit	110 Unit	3.228.967.500,00	3.228.967.500,00	3.228.967.500,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			309.827.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 10-12	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pelaksanaan Kegiatan PKB				100 %	100 %	893.551.800,00	893.551.800,00	887.661.800,00	-5.890.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		889.154.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	361.215.000,00	361.215.000,00	361.215.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel.Des	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			209.947.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				5000 Dokumen	5000 Dokumen	152.036.800,00	152.036.800,00	146.146.800,00	-5.890.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel.Des	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			281.777.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 10-12	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				4 Unit	4 Unit	380.300.000,00	380.300.000,00	380.300.000,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel.Des	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			396.330.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pengaditan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dan pembangunan ZOSS dalam 1 tahun				100 %	100 %	4.939.172.500,00	3.949.464.500,00	11.528.345.172,00	6.589.172.672,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		4.759.275.110,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.06.0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)																			
			Jumlah Terbangannya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)				1 Unit	17 Unit	141.285.300,00	141.285.300,00	1.933.766.800,00	1.792.480.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel.Des	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			310.813.360,00	DINAS PERHUBUNGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 10-12	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perleengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas																			
			Jumlah Perleengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				3 Dokumen	5 Dokumen	4.787.887.200,00	3.808.179.200,00	9.594.579.372,00	4.796.682.172,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			4.448.461.750,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penerbitan Lalu Lintas pada tahun berjalan				100 %	100 %	153.600.000,00	177.920.000,00	250.912.000,00	97.312.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		195.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				32 Laporan	32 Laporan	153.600.000,00	177.920.000,00	250.912.000,00	97.312.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			195.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
3.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Sarana dan Prasaana Perhubungan Laut yang tersedia				73 %	73 %	11.670.708.208,00	10.298.300.423,00	7.547.605.923,00	9.774.041.840,00							21.444.750.048,00		
		Persentase peningkatan jumlah penumpang Transportasi Laut yang dilayani oleh Dinas Perhubungan (Trans Batam)				24 %	24 %														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 10-12	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dermaga yang dibangun dan dipelihara pada tahun berjalan				7 Unit	4 Unit	7.013.670.800,00	5.641.238.000,00	2.159.193.500,00	-4.854.477.300,00			Melanjutkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		15.215.938.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal																		
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	4.272.629.000,00	4.272.629.000,00	334.381.500,00	-3.938.247.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			11.748.586.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal																		
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara				4 Unit	4 Unit	2.741.041.800,00	1.368.609.000,00	1.824.812.000,00	-916.229.800,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			3.467.352.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 10-12	14	15	16	17	18	19	20	21
		UPTD TRANSPORTASI								133.460.409.681,00	126.321.935.323,00	141.224.349.582,00	7.763.939.901,00						178.152.945.139,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							133.460.409.681,00	126.321.935.323,00	141.224.349.582,00	7.763.939.901,00							178.152.945.139,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							133.460.409.681,00	126.321.935.323,00	141.224.349.582,00	7.763.939.901,00							178.152.945.139,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD				73.53 Nilai	73.53 Nilai	48.985.704.763,00	46.817.189.016,00	45.688.966.803,00	103.962.909,00							48.089.667.672,00	
			Indeks Pelayanan Kesekretariatian Dinas Perhubungan				92 Nilai	92 Nilai												
	2.15.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	persentase pelayanan BLUD				100 %	100 %	15.328.666.200,00	15.328.666.200,00	15.378.902.805,00	50.236.605,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		Masyarakat	12.911.053.750,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	15.328.666.200,00	15.328.666.200,00	15.378.902.805,00	50.236.605,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel.Desu	PENDAPATAN DARI BLUD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			12.911.053.750,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat yang tersedia				71 %	71 %	72.803.996.710,00	69.206.445.884,00	87.987.776.856,00	34.814.530.709,00							107.618.527.419,00	
			Persentase peningkat jumlah penumpang transportasi darat yang dilayani oleh Dinas Perhubungan (Trans Batam)				12 %	12 %												
			Persentase angkutan barang dan angkutan penumpang umum yang lulus uji KIR				53 %	53 %												
			Persentase Peningkatan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum				5 %	5 %												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 10-12	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam				42 %	42 %	50.512.076.110,00	47.232.505.284,00	49.879.675.284,00	-632.400.826,00			Melakukan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		73.322.744.143,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				69 Unit	69 Unit	50.512.076.110,00	47.232.505.284,00	49.879.675.284,00	-632.400.826,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melakukan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			73.322.744.143,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang tersedia				73 %	73 %	11.670.708.208,00	10.298.300.423,00	7.547.605.923,00	9.774.041.940,00							21.444.750.048,00	
		Persentase peningkatan jumlah penumpang Transportasi Laut yang dilayani oleh Dinas Perhubungan (Trans Batam)				24 %	24 %													
	2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Transportasi Laut yang beroperasi Persentase Pulau yang terlayani dengan transportasi laut Persentase pulau yang terlayani oleh transportasi laut				8 Unit	100 % 8 Unit	4.667.037.408,00	4.667.062.423,00	5.388.412.423,00	731.375.015,00			Melakukan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		6.228.812.048,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 10-12	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.03.2.07.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				7 Laporan	7 Laporan	4.657.037.408,00	4.657.062.423,00	5.388.412.423,00	731.375.015,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			6.228.812.048,00	DINAS PERHUBUNGAN
		UPTD PELAYANAN PARKIR								133.460.409.681,00	126.321.935.323,00	141.224.349.582,00	7.763.939.901,00					178.152.945.139,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							133.460.409.681,00	126.321.935.323,00	141.224.349.582,00	7.763.939.901,00							178.152.945.139,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							133.460.409.681,00	126.321.935.323,00	141.224.349.582,00	7.763.939.901,00							178.152.945.139,00	
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLA.)	Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat yang tersedia				71 %	71 %	72.803.996.710,00	69.206.445.884,00	87.987.776.856,00	34.814.530.709,00							107.618.527.419,00	
			Persentase peningkatan jumlah penumpang transportasi darat yang dilayani oleh Dinas Perhubungan (Trans Batam)				12 %	12 %												
			Persentase angkutan barang dan angkutan penumpang umum yang lulus uji KIR				53 %	53 %												
			Persentase Peningkatan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum				5 %	5 %												
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Tiik Parkir yang yang dikalota / Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Lulus Uji				25 lokasi	100 : 80 %	10.166.010.500,00	10.146.090.500,00	11.812.289.000,00	1.646.278.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan 2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan	Masyarakat		18.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 10-12	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	10.166.010.500,00	10.146.090.500,00	11.812.289.000,00	1.646.278.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang modern, merata, berkualitas dan berkelanjutan			18.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
			JUMLAH						133.460.409.681,00	126.321.935.323,00	141.224.349.582,00	-7.763.939.901,00							178.152.945.139,00		

BAB IV

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penyesuaian terhadap dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah, hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, serta perubahan kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2026. Penyusunan dokumen ini juga menjadi bagian dari implementasi Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025–2029 dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah di bidang perhubungan.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa penyelenggaraan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan secara umum telah berjalan sesuai dengan tahapan yang direncanakan. Rasio Konektivitas Laut telah tercapai 100% sesuai target, sedangkan Rasio Konektivitas Darat (99,01% dari target) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (98,99% dari target) sudah hampir mencapai target namun masih memerlukan penguatan, masing-masing melalui optimalisasi jaringan angkutan darat dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II 2026 masih didominasi oleh belanja operasional, sementara pelaksanaan kegiatan fisik diperkirakan akan meningkat pada triwulan berikutnya seiring selesainya proses pengadaan dan pelaksanaan kontrak.

Sejalan dengan hasil evaluasi tersebut, dilakukan penyesuaian terhadap program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, dan pagu anggaran agar pelaksanaan pembangunan bidang perhubungan tetap efektif, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta perkembangan kondisi daerah. Penyesuaian tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan transportasi, keselamatan lalu lintas, konektivitas wilayah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kota Batam.

4.1. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penyesuaian terhadap dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah, hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, serta perubahan kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2026. Penyusunan dokumen ini juga menjadi bagian dari implementasi Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025–2029 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah di bidang perhubungan.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa penyelenggaraan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Perhubungan Kota Batam secara umum telah berjalan sesuai dengan tahapan yang direncanakan. Capaian kinerja pada beberapa indikator menunjukkan hasil yang baik dan mendekati target yang telah ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat indikator dan aspek pelayanan yang memerlukan peningkatan, khususnya dalam penguatan konektivitas transportasi laut, peningkatan kualitas pelayanan transportasi, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pemenuhan sarana dan prasarana transportasi di wilayah yang masih membutuhkan dukungan pelayanan.

Pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2026 juga perlu memperhatikan hasil evaluasi penyerapan anggaran dan perkembangan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan operasional dan kegiatan yang bersifat berkelanjutan telah berjalan, sedangkan beberapa kegiatan pengadaan dan pembangunan fisik masih berada pada tahapan persiapan dan pelaksanaan sesuai proses pengadaan dan kontraktual. Oleh karena itu, percepatan pelaksanaan kegiatan pada semester berikutnya perlu dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, ketepatan sasaran, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyesuaian program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, dan pagu anggaran dalam Perubahan Renja dilakukan untuk

memastikan agar sumber daya yang tersedia dapat diarahkan pada prioritas pembangunan yang memiliki daya ungkit terhadap peningkatan pelayanan transportasi. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan bidang perhubungan diharapkan dapat berjalan secara efektif, efisien, adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan Kota Batam.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Perhubungan perlu terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah terkait, instansi vertikal, Badan Pengusahaan Batam, aparat penegak hukum, operator transportasi, serta pemangku kepentingan lainnya. Sinergi tersebut diperlukan untuk mendukung peningkatan konektivitas, keselamatan dan ketertiban lalu lintas, kualitas pelayanan angkutan umum, pelayanan transportasi laut, serta penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi di Kota Batam.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan bidang perhubungan selama Tahun Anggaran 2026, Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Batam dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

- Perubahan Renja menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun Anggaran 2026.
- Seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan dilaksanakan sesuai target kinerja, indikator, serta pagu anggaran yang ditetapkan dalam Perubahan Renja, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Setiap unit kerja bertanggung jawab atas pencapaian target kinerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing, melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif, efisien, tepat waktu, dan akuntabel.

- Pelaksanaan Perubahan Renja dilakukan secara terintegrasi dan sinergi melalui penguatan koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarbidang di lingkungan Dinas Perhubungan serta dengan perangkat daerah, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan lainnya guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan daerah.
- Monitoring, pengendalian, dan evaluasi dilaksanakan secara berkala untuk mengidentifikasi permasalahan dan hambatan pelaksanaan, mengukur pencapaian target kinerja, mengevaluasi efektivitas pemanfaatan anggaran, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
- Pelaksanaan kegiatan diarahkan pada pencapaian keluaran dan hasil yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan transportasi, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, konektivitas antarwilayah, serta peningkatan pelayanan transportasi laut dan angkutan umum.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut atas Perubahan Renja Tahun 2026, Dinas Perhubungan Kota Batam akan melaksanakan percepatan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dengan tetap memperhatikan kualitas pelaksanaan, ketepatan sasaran, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengendalian dan evaluasi akan dilaksanakan secara berkala sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, hasil monitoring dan evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan laporan kinerja perangkat daerah serta bahan penyempurnaan perencanaan pada periode berikutnya.

Selanjutnya, Dinas Perhubungan Kota Batam akan terus melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan transportasi melalui optimalisasi penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, peningkatan keselamatan transportasi, pengembangan sarana

dan prasarana perhubungan, penguatan konektivitas darat dan laut, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Apabila dalam pelaksanaannya terjadi perubahan kebijakan nasional maupun daerah, dinamika kondisi keuangan daerah, atau perkembangan lain yang memengaruhi pencapaian target pembangunan, Perubahan Renja ini dapat disesuaikan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2026, diharapkan seluruh jajaran Dinas Perhubungan memiliki arah yang sama dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, sehingga seluruh program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal, terukur, dan akuntabel, guna mewujudkan sistem transportasi yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terintegrasi, serta mendukung terwujudnya pembangunan Kota Batam yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.

WALI KOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD